

**DISKURSUS *KAWIRYAN* SEBAGAI LEGITIMASI  
KEKUASAAN KASULTANAN ISLAM  
DALAM *SERAT SAPTASTHA***

***KAWIRYAN* DISCOURSE AS THE LEGITIMACY  
OF THE ISLAMIC SULTANATE IN *SERAT  
SAPTASTHA***

**Afiliasi Ilafi Supana**

Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
E-mail: [afiliasiilafi60@gmail.com](mailto:afiliasiilafi60@gmail.com)

**Supana**

Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
E-mail: [\\_supanakaprodi@yahoo.co.id](mailto:_supanakaprodi@yahoo.co.id)

**Abstract:** The purpose of writing this article is to analyze the discourse of heroism (*kawiryan*) according to Sultan Hamengkubuwana VII contained in the *Serat Saptstha* manuscript. It is a type of historical manuscript that provides an overview about the discourse stored in the content of the manuscript. The Sultan discussed in this article is Hamengkubuwana VII. He is an Islamic Sultan who ruled the societies in 1877-1921. His reign is in Keraton Ngayogyakarta (Ngayogyakarta Palace) and it is a kind of Islamic Sultanate. Based on the conclusion of this study, Hamengkubuwana VII as the King sent by God performed an image as a very humble sultan. The legitimacy of his power promotes an understanding of Islamic Sultanate represented by Hamengkubuwana VII. The representation of peaceful and serene life portrayed by Hamengkubuwana VII makes the image of Hamengkubuwana VII to be an irreplaceable sultan and his personality also inspires the societies in terms of the importance to always remember The Creator or on the other word is God.

**Keywords:** local, Islam, culture.

**Abstrak:** Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui wacana kepalawanan (*kawiryen*) menurut Sultan Hamengkubuwana VII yang tertuang di dalam isi teks naskah *Serat Saptstha*. *Serat Saptastha* yang merupakan jenis teks naskah sejarah ini memberikan gambaran mengenai wacana-wacana yang tersimpan di balik isi naskah tersebut. Sultan yang dimaksud pada penulisan ini, yakni Hamengku Buwana VII. Hamengku Buwana VII yang merupakan sultan Islam ini pernah berkuasa ditahun 1877-1921. Kekuasaannya berada di Keraton Ngayogyakarta serta merupakan kasultanan Islam. Berdasarkan penulisan ini, diperoleh kesimpulan bahwa Hamengku Buwana VII sebagai raja utusan Tuhan memberikan citra sebagai sultan dengan sikap kesederhanaan. Legitimasi kekuasaan memunculkan pemahaman mengenai kasultanan Islam yang dicitrakan oleh Hamengku Buwana VII. Harapannya mendekatkan diri untuk menikmati hidup yang damai dan tenteram, citra inilah yang menjadikan Hamengku Buwana VII sebagai sultan yang tidak tergantikan dan memberikan pengetahuan jika selayaknya selalu mengingat kepada Sang Maha Pencipta.

**Kata kunci:** lokal, Islam, budaya.

## A. PENDAHULUAN

Seiring memudarnya kekuasaan Majapahit pada abad 15-16, maka di Jawa berdiri kesultanan Islam Demak yang didesain sebagai bentuk pemerintahan Islam yang memiliki *majelis syura* (dewan musyawarah) yang terdiri dari para wali yang ahli agama. Sejak saat itulah, pemerintahan Islam berkembang di Jawa sampai dengan berdirinya kerajaan Mataram Islam yang Panembahan Senopati pada abad ke-17.

Salah satu kasultanan Islam yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram adalah kesultanan Yogyakarta. Kesultanan ini sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan dan di masa perjuangan Yogyakarta telah memberikan sumbangan yang berharga bagi pemerintah Republik Indonesia. Yogyakarta pernah menjadi Ibu kota Republik Indonesia selama beberapa tahun. Saat ini, Kasultanan Ngayogyakarta merupakan salah satu kerajaan Islam Jawa yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih tetap eksis hingga sampai saat ini. Kerajaan ini merupakan titik lanjut dari runtuhnya kerajaan mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati (Zuhriyah, 2013: 91).

Pada tahun 1877-121, Kasultanan Ngayogyakarta dipimpin oleh raja

yang mendapatkan sebutan sebagai *Sinuwun Sugih*, yakni Hamengku Buwana VII. Kekuasaannya yang telah menjadi kasultanan Islam membawanya lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta diakhir usianya. Pilihannya untuk menanggalkan tahta dan menjadi *pandhita* perlu diapresiasi. Keputusanannya tersebut tertuang di dalam isi naskah kuna, yakni *Serat Saptastha*. Naskah yang tersimpan di perpustakaan museum Sonobudoyo Yogyakarta ini merupakan tergolong ke dalam teks naskah sejarah. Hamengku Buwana VII sebagai sultan yang menciptakan perubahan-perubahan di zamannya mampu memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Perubahan tersebut memberikan pengaruh kepada rakyat maupun para koleganya mengenai citra Hamengku Buwana VII sebagai raja yang luar biasa.

Wacana mengenai kekuasaan Hamengku Buwana VII yang memilih untuk menanggalkan tahta atau *lengser keprabon* berdampak pada legitimasi kekuasaannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui wacana kepahlawanan Hamengku Buwana VII sebagai kasultanan Islam yang mendapatkan pengakuan kekuasaannya dari berbagai pihak. Kekuasaannya tidak berhenti setelah peristiwa *lengser keprabon*, naskah *Serat Saptastha* diinterpretasikan sebagai wacana kepahlawanan Hamengku Buwana VII dalam menghadapi dan menerima peristiwa yang menyangkut dirinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan wacana kepahlawanan Hamengku Buwana VII di dalam naskah *Serat Saptastha* sebagai legitimasi kekuasaan kasultanan Islam.

## B. KERANGKA TEORITIK

Diskursus atau wacana merupakan teori yang dipopulerkan oleh Foucault, Dia lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Perancis dengan nama Paul Michel Foucault. Michel Foucault lahir di tengah-tengah keluarga ahli medis di Poiteirs Prancis. Walaupun keluarganya ahli di bidang kedokteran, namun Foucault lebih tertarik filsafat, sejarah serta psikologi. Foucault dianggap sebagai orang yang mempunyai pandangan kontroversi seperti yang tertuang di dalam tulisan-tulisannya seperti *Folie et Deraison* (Kegilaan dan Peradaban), dan *Naissance de la Clinic (Iahirnya Klinik)* keduanya diterbitkan di Fillingham mengantarkannya sebagai tokoh filsuf serta sejarawan yang terkemuka di ranah paradigma pasca strukturalisme (Lubis, 2014:161).

Diskursus bagi Foucault merupakan sebuah cara satu-satunya untuk memahami realitas atau dunia (Lubis, 2014: 83), sehingga terbentuknya wacana dan mengkonstruksikan peristiwa tertentu dan gabungan dari peristiwa-

peristiwa tersebut ke dalam narasi yang dapat dikenali oleh kebudayaan tertentu (Eriyanto, 2001: 75). Barker menuliskan bahwa Foucault menerangkan dalam argumennya mengenai kondisi-kondisi historis dimana pertanyaan-pertanyaan dikombinasi maupun diregulasi dengan tujuan untuk membentuk dan mendefinisikan suatu bidang pengetahuan ataupun objek tertentu yang membutuhkan seperangkat konsep serta memunculkan sebuah rezim membenaran yang nantinya akan menentukan apakah yang termasuk sebagai kebenaran (2005:104-105).

Michel Foucault yang merupakan seorang filsuf anti-esensialisme dan pascastrukturalisme inilah yang menolak tradisi berpikir terhadap tiga hal pada ranah diskursus di antaranya:

1. Menolak kebenaran transendental sebagaimana mendominasi filsafat modern seperti konsep Kant, Descartes, dan Husserl tentang adanya kebenaran yang mutlak atau kebenaran akhir asal-usul adanya sesuatu seperti Tuhan, ide, roh absolut, kebenaran mutlak dan abadi berasal dari substansi transenden yang metafisis yang berada pada di luar ruang serta waktu. Sebaliknya, sebagaimana pemikir post modernisme yang lain, Foucault memiliki asumsi bahwa tidak ada sebuah kebenaran yang mutlak dan universal karena filsafat dan ilmu pengetahuan bersumber dari upaya manusia untuk menyikap rahasia alam. Pada konsep teori Arkeologi yang kemudian sejak tahun 1970 populer dengan sebutan Genealogi, Foucault mengemukakan bahwa tidak ada kebenaran maupun ide yang diturunkan dari “dunia sana” melainkan berasal dari konstruksi berpikir yang bersumber dari wacana-wacana pada *episteme* kurun sejarah tertentu (Lubis, 2014:68).

2. Menolak adanya konsep subjek universal seperti halnya teori yang dipaparkan oleh teori Marx bahwa kesadaran dikonstruksi oleh kelas sosial sehingga menimbulkan adanya perbedaan kesadaran, nilai-nilai antar kelas proletar dan borjuis. Menurut Foucault, subjek merupakan produk sejarah, produk dari diskursus yang berbeda dari satu era ke era lain. Kuasa yang oleh Foucault dipahami sebagai kemampuan mengkomunikasikan pikiran untuk mempengaruhi kehendak orang lain pada proses *diskursuf* yang menyebar pada personal-personal dan inter-personal, di bawah kendali pengetahuan yang telah menyatu menjadi sistem pola pikir masyarakat yang diistilahkan Foucault *episteme* oleh kuasa agung yaitu penguasa. Pada proses sosialisasi dalam *episteme* kurun sejarah tertentu manusia mengalami proses menjadi pribadi-pribadi yang oleh Foucault disebut sebagai teknologi menjadi subjek.

Pribadi-pribadi atau subjek-subjek yang telah diformula oleh *episteme* pengetahuan tersebut akan selalu berusaha senyawa dengan norma-norma dan aturan-aturan sehingga secara otomatis menjadi jiwa-jiwa patuh terhadap penguasa. Foucault dalam Lubis (2014:73) menjelaskan bahwa dalam fase histori tertentu apa yang disebut apa yang disebut sebagai kebenaran dikonstruksikan untuk mendistribusikan kekuasaan lewat lembaga-lembaga hukum, pendidikan, pelatihan, penjara, rumah sakit yang hasilnya akan mencirikan pemilihan-pemilihan antara yang gila atau yang waras, bodong dengan pandai serta patuh dan melawan, kawan dan lawan.

3. Menolak paradigma strukturalisme yang berasumsi bahwa perkembangan pola pikir manusia lebih ditentukan oleh struktur ataupun sistem sosial, politik, ekonomi dan bahasa, di sekitarnya. Bukan manusia yang menciptakan makna melalui bahasa tetapi sebaliknya bahasa dan budayalah yang mengkonstruksi pikiran manusia. Foucault dalam Lubis (2014:168) mengkritisi pandangan kaum strukturalus yang dipelopori oleh Levi Strauss bahwa dengan hilangnya otonomi imajinasi kreatif manusia sebagaimana sumsi strukturalisme berarti telah terjadi “kematian manusia” (*the death of man*). Menurut Foucault meskipun ia mengakui adanya episteme atau sistem yang menstruktur pikiran manusia, tetapi tidak bersifat kontinu, sebaliknya diskontinu (bisa berubah dan berganti-ganti) dari satu zaman atau tempat ke zaman dan tempat yang lain.

Hook berpendapat bahwa pada analisis wacana tidak hanya disibukkan untuk mencari makna yang luas, tetapi dengan mencari kelangkaan makna yang tidak dapat dikatakan serta yang tidak mungkin atau tidak masuk akal dalam ranah diskursif (2001:11). Penjelasan Foucault dalam artikelnya yang berjudul “*The Subject and Power*” (1982) menuliskan bahwasanya di dalam analisis hubungan kekuasaan perlu adanya poin konkret. *The analysis of power relations demands that a certain number of points be established concretely:*

1. *The system of differentiation*

Sistem diferensiasi yang memungkinkan seseorang untuk bertindak atas tindakan-tindakan lain.

2. *The types of objectives*

Jenis tujuan menitikberatkan kepada tindakan-tindakan lain seperti pemeliharaan hak istimewa, akumulasi keuntungan, kekuasaan, perdagangan.

3. *The means of bringing power relations into being*

Sarana untuk membawa hubungan kekuasaan yang kurang kompleks dengan sarana teknologi.

4. *Forms of institutionalization*

Pada bentuk lembaga yang lebih cenderung tercantum oleh tradisional, fenomenanya berhubungan dengan bentuk *fashion*.

5. *The degree of rationalization*

Derajat rasionalisasi: dapat membawa dalam permainan hubungan kekuasaan sebagai bidang tindakan yang memungkinkan kurang rumit efektivitas instrumen. (Foucault, 1982: 792)

Graham (2005:70) memberikan kesimpulan mengenai wacana menurutnya yang dipopulerkan oleh Foucault. Analisis diskursus menurut Foucault dibatasi pada tataran diskursus sedangkan pada tataran tindakan manusia dan susunan benda-benda tidak memiliki hubungan langsung dengan diskursus (Agusta, 2014: 19-20).

### C. WACANA RAJA SEBAGAI UTUSAN TUHAN

Konsep kepemimpinan Islam menganut paham bahwa raja atau sultan adalah “khalifatullah” atau wakil Allah. Hal ini diadopsi dalam kepemimpinan Islam Jawa, khususnya di Yogyakarta dengan gelaran raja sebagai “khalifatullah sayidin Panataga”, yang mempunyai makna sebagai khalifat Allah, pemimpin yang memimpin agama. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Sultan (pemerintahan) itu adalah naungan Allah SWT di muka bumi (Taufiq, 2014: 229), sehingga penyebutan tersebut menambah citra mengenai Sultan sebagai khalifat Allah yang merupakan orang pilihan sebagai utusan Allah yang tidak semua orang dapat diberikan kepercayaan untuk memimpin oleh Allah. Pada ayat Al-Qur’an surat An Nur yang berbunyi bahwa “”Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan”(an-Nur: 90). Ayat Al-Qur’an tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dengan berbuat baik dan adil merupakan perintah Allah melalui kitabullah, sehingga raja tetap mendapatkan legitimasi kekuasaan.

Menjadi seorang pemimpin perlu memenuhi syarat-syarat, seperti pada Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* yang menuliskan bahwa syarat menjadi seorang pemimpin perlu memenuhi beberapa hal, yaitu a) adil dengan ketentuan-ketentuannya; b) ilmu yang bisa mengantar pada ijtihad dalam menetapkan permasalahan kontemporer dan hukum-hukum; c) mempunyai

fisik yang sehat jasmani, baik pendengaran, penglihatan, maupun lisan karena agar dapat dapat secara langsung menangani tugas kepemimpinannya; d) mempunyai keadaan yang normal atau tidak cacat sehingga tidak menghalangi untuk bergerak dan bereaksi; e) memiliki sikap bijak dalam mengurus rakyat dan mengatur kepentingan negara; f) memiliki sikap keberanian yang dapat digunakan untuk melindungi wilayah dan memerangi musuh (Al-Atsari dalam Taufiq, 2014: 241-242).

Raja merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan keraton. Darsiti (2000:210) menyebutkan bahwa raja narapati atau narendra yang mempunyai arti sebagai manusia luhur yang sangat dimuliakan oleh rakyatnya. Seperti pada pemimpin di keraton Yogyakarta yang menyebut raja dengan Sultan. Pada konsep Jawa memandang raja sebagai seseorang yang dianugerahi kerajaan dengan kekuatan politik, militer dan keagamaan yang absolut serta raja adalah pemegang penuh di berbagai bidang. Keputusan raja tidak dapat ditentang karena raja yang merupakan wakil Tuhan. Raja sebagai pemegang kekuasaan penuh (Yuniyanto, 2010: 18-24). Oleh karena itu, tidak sembarangan untuk mendapatkan kedudukan sebagai raja jika tidak dapat memenuhi syarat atau bagian dari keturunan langsung dari raja sebelumnya.

Susetya (2007:111) menjelaskan bahwa pada ranah kejawen, raja atau pemimpin dikontestualkan juga kepada guru atau orang tua yang diharuskan mempunyai sikap ataupun perilaku yang dapat memberikan pengetahuan ataupun teladan terhadap rakyatnya, seperti *mulat*, *milolo*, *miluta*, *palidarma* dan *palimarma*. Kekuasaan Jawa tertanam motivasi untuk raja, penguasa atau pemimpin yang bersikap adil, baik, dicintai oleh rakyatnya dan mempertahankan ketenteraman serta kesejahteraan negara kekuasaannya, walau memerlukan kekerasan untuk tetap mempertahankannya (Sulistiyono, 2013: 22-23).

Raja sebagai wakil Tuhan dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, artinya bahwa di dalam diri raja terdapat kekuatan yang mencerminkan dengan jiwa Ilahi sehingga raja tidak dapat diatur secara duniawi. Bagi orang Jawa, raja diharapkan dapat terus-menerus mencari tuntunan ilahi di dalam batin ini (Moertono, 1985: 48). Kedudukan raja berada pada struktur tertinggi, baik dari segi status sosial maupun politik. Darsiti (2000: 209) menjelaskan bahwa raja menduduki sebagai masyarakat tertinggi yang diikuti oleh kaum bangsawan, golongan priyayi dan golongan-golongan lain yang telah disebutkan sebelumnya. Status sosial tinggi di keraton tercermin dari nama, gelar, atau sebutan yang disandangnya. Hamengku Buwana VII sebagai raja

pada masa dinasti Mataram Islam tentu memberikan keleluasaan terhadap bidang keagamaan bagi rakyatnya. Hamengku Buwana VII sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan struktur tertinggi, yakni raja maka sikap bertanggung jawab diperlukan dalam berbagai hal untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi, selain berstatus sebagai raja, Hamengku Buwana VII mempunyai kewajiban atas apa yang terjadi pada dirinya karena Tuhan telah memilih untuk memimpin rakyatnya. Seperti dalam Ibnu Umar ra bahwa Nabi SAW bersabda “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya”.

Raja yang mendapatkan sebutan sebagai *Sinuwun Sugih* disebabkan memiliki kekayaan yang melimpah juga memiliki hati yang baik, dermawan dan sederhana. Raja terhadap kekuasaannya banyak diceritakan mengenai kekuasaan Jawa di berbagai manuskrip kuna seperti *Serat Niti Praja*, *Serat Niti Sastra* dan *Serat Wulang Reh* (Purwadi, 2007:466). Seperti halnya di manuskrip kuna *Serat Saptastha* yang berisi mengenai peralihan kekuasaan Jawa, yakni Hamengku Buwana VII kepada Pangeran Adipati Anom yang berganti menjadi Hamengku Buwana VIII. Hamengku Buwana VII sebagai raja Yogyakarta ditahun 1877-1921 memberikan banyak perubahan di masanya. Sebagai utusan Tuhan, Hamengku Buwana VII mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang tidak mudah, dengan sikap futuristik dan sederhananya, Hamengku Buwana VII mampu menjadikan dirinya sebagai raja yang tidak terlupakan. Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan HR Bukhari yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kaya bukanlah dengan memiliki kekayaan harta, namun memiliki kekayaan hati.

Kekuasaan Hamengku Buwana VII sebagai kasultanan Islam menambah daftar citra yang ditampilkan olehnya. Sikapnya yang penuh kesederhanaan walau memiliki kekayaan yang melimpah, tidak menjadikan Hamengku Buwana VII tamak dengan keduniawian. Hamengku Buwana VII memilih menghabiskan masa tuanya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, alasan inilah menjadi Hamengku Buwana VII semakin dihormati oleh berbagai kalangan. Seperti pada pupuh mijil *pada* 26 sebagai berikut:

(26) Baya katemben umiyat/ naréndra kang şeļeh kaprabon adi/ jumeneng pandhita ratu/ ñeng pura Ngambarukma,/ dadi mindeng ngudi sidaning

tumuwuh,/ winawas wosing wasana/ kasengsem kahanan jati./ (Dirgantara, 2014: 69)

terjemahan:

(26) karena baru pertama kali melihat Kanjeng Sri HB VII melepaskan tahta menjadi pendeta di istana Ambarukma. Berhentilah Kanjeng Sri HB VII mencari penerus tahtanya. Akhir cerita semuanya senang terhadap suasana yang sejati. (Dirgantara, 2014: 82).

Keputusan Hamengku Buwana VII merupakan keputusan yang jarang dilakukan karena pada umumnya seorang penguasa ingin berkuasa selamanya. Bentuk *lengser keprabon* merupakan kearifan lokal yang merupakan wacana dalam model kekuasaan Jawa tempo dahulu. Wacana mengenai kepahlawanan Hamengku Buwana VII selama memimpin negaranya memberikan pengetahuan yang masih diingat oleh masyarakat. Adanya wacana mengenai Hamengku Buwana VII di dalam isi naskah *Serat Saptastha* memberikan pengetahuan yang terus-menerus diproduksi. Produksi wacana tersebut berdampak pada legitimasi kekuasaan yang diperoleh Hamengku Buwana VII dari para rakyatnya dan koleganya.

#### D. DISKURSUS *KAWIRYAN* DALAM *SERAT SAPTASTHA*

Diskursus *kawiryan* atau wacana kepahlawanan merupakan citra yang ditunjukkan oleh Hamengku Buwana VII, wacana tersebut menghasilkan pengakuan atau legitimasi kekuasaan terhadap gaya kepemimpinan Hamengku Buwana VII. Kepemimpinannya yang terus diagung-agungkan dan tidak tergantikan sehingga memberikan pengetahuan mengenai raja yang memimpin dengan citra sederhana dan berpikir futuristik. Wacana kepahlawanan Hamengku Buwana VII tertuang pada salah satu naskah kuna, yakni *Serat Saptastha*.

Salah satu pandangan Islam mengenai pemimpin dapat dilihat di Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan itulah orang-orang yang beruntung*” (QS. Ali Imran: 104). Maksud adanya Firman Allah ini merupakan seruan dari Allah untuk hambanya agar senantiasa menjadi manusia menjalankan kewajiban yang memberikan pengaruh positif untuk dirinya ataupun golongannya.

Naskah *Serat Saptastha* merupakan manuskrip kuna yang tersimpan di

Museum Sonobudoyo Yogyakarta dan tidak terdapat nama pujangga yang menulis naskah ini. Pujangga pada naskah *Serat Saptastha* menggambarkan bagaimana kekuasaan Hamengku Buwana VII secara tidak langsung. Kekuasaan Hamengku Buwana VII tidak dapat lepas dari sikapnya yang berjiwa pahlawan diakhir kepemimpinannya. Sikap pahlawan Hamengku Buwana VII inilah secara tidak langsung mengarah kepada konsep keagungbinataran. Konsep keagungbinataran dalam kekuasaan Jawa merupakan pengakuan bahwa raja memiliki sikap *agung binatara, bahu dendha nyakrawati, berbudi bawa laksana, ambeg adil paramarta* yang berarti besar laksana kekuasaan dewa, pemeliharaan hukum dan penguasa dunia, meluap budi luhur mulianya dan bersikap adil terhadap sesama (Moedjanto dalam Hadiwijoyo 2013: 35).

Raja yang memahami konsep keagungbinataran akan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Bermurah hati kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan (Fajrul, 2016: 1). Seperti halnya Sri Sultan Hamengku Buwana VII yang sebagai raja yang disegani oleh rakyatnya bahkan hingga sampai sekarang pun *trah silsilah* Sri Sultan Hamengku Buwana VII masih menghormatinya dengan adanya khaul yang dilakukan rutin menjadi bukti bahwa Sri Sultan Hamengku Buwana VII mempunyai kharisma raja yang membentuk *power* hingga sekarang. Sikap keagungbinataran diinterpretasikan pada sosok Sri Sultan Hamengku Buwana VII dalam *Serat Saptastha*. Sikap Hamengku Buwana VII tersebut terjadi pada beberapa puluh tahun silam memberikan pengaruh terhadap rakyat maupun pengikutnya mengenai langkah yang diambil. Seperti pada pupuh mijil *pada* 13-14 yang tertuang di dalam isi naskah *Serat Saptastha*, sebagai berikut:

(13) Sri naréndra sareng wus nampeni/ atur kang mangkono/ sanalika galih dalem kaget./ ngungun déné makaten. Jeng gusti/ kꦑꦺꦤꦠꦺꦤ꧀ semedi/ locana ngembeng luh/

(14) *karaos-raos raosing galih./ Muwus Jeng Sang Katong/ sirna karonta-ronta rentengé./ malah dadi arsayaning galih./ Ngleresaken angling/ sabab sampun sepuh./* (Dirgantara, 2014: 65).

terjemahan:

(13) Kanjeng Sri HB VII sesudah menerima pesan demikian seketika hatinya kaget, sebab sangat heran. Beliau terdiam bersemedi dan matanya menahan air mata (14) merasakan perasaan yang ada di dalam hatinya. Kanjeng Sri HB

VII berkata, “Hilang beban pikiranku, malah jadi gembira hati setuju dengan jawaban Pangeran Adipati Anom karena aku sudah tua.” (Dirgantara, 2014: 74).

Cuplikan *pada* 13-14 tersebut diinterpretasikan bahwa Hamengku Buwana VII bukan orang yang mengagung-agungkan kedudukan, sikapnya terlihat rendah hati dan menerima dengan lapang dada. Hamengku Buwana VII merupakan sesosok ayah yang mengedepankan masa depan putranya, pemikiran yang futuristik inilah menyebabkan banyaknya perubahan, baik di bidang pendidikan, kesenian, perekonomian, maupun organisasi keagamaan. Dapat dikatakan jika selama Hamengku Buwana VII memimpin tidak pernah terjadi pertikaian, seperti yang tertuang pada isi naskah *Serat Saptastha* pupuh mijil *pada* 39-43. *Pada* tersebut seolah-olah menceritakan kesedihan yang dialami oleh banyak pihak.

(39) *Dupi myarsa mañch sabḍeng aji,/ pra wadon kadhaton/ saya seru swara jerit mañch,/ nangis kadya gerah gegeteri/ ngrasa wuwuh sedhah,/ ing pura udan luh/*

(40) *kongsi ngatirah nétrané kalih,/ sajeroning batos/ kadya koncatan jiwa rasané,/ lir winenyet-wenyeting benyinyih/ munyet nganyih-anyih/ kényut nganyut-anyut./*

(41) *Sambat tan kuwat aku ningali/ ing Kangjeng Sang Katong,/ wong wis sepuh mangkéné anané/ jumeneng patang puluh warsi/ [7] tanpa kawis-kawis/ dadak iki timbul/*

(42) *lalakon kang angaḅh-aḅchi/ gustiku. Sayektos/ ngong puji mungkur wawiya baé,/ pamuwusé sinarengan tangis/ mijet pulung //ati/ katon sendhal-sendhal./*

(43) *Warna-warna sasambating dasih/ labeté wong wadon./ Adon-adoning pamikir çetḅek/ methik adat ingkang uwis-uwis/ tan was-was ngecuwis/ muwus nyengguh luput./*

Terjemahan:

(39) Namun ketika Kanjeng Sri HB VII akan berkata lagi para putri di kerajaan semakin keras suara teriaknya, menangisnya seperti guntur yang menakutkan membuat rasa sedihnya bertambah. Di pura hujan air mata (40) sampai memerahkan ke dua matanya. Di dalam hati rasanya seperti kehilangan jiwa. Sambil memijit-mijit bekas *gudhig*, para putri menangis terus karena merasakan kesedihannya. (41) “Tidak tega aku melihat Kanjeng Sri HB VII, beliau keadaannya sudah tua, selama empat puluh enam tahun

bertahta tanpa adanya masalah seketika itu muncul (42) kejadian yang aneh (tidak seperti biasanya). Sungguh aku berdoa di belakang saja,” berbicaranya menangis tersedu-sedu sambil menekan ulu hati. (43) Sangat bermacam-macam keluh kasih dari para abdi yang ikut merasakan penderitaan para putri. Pemikiran singkat seperti itu jika dilihat dari adat yang sudah-sudah tanpa banyak pertimbangan dianggap salah.

Hamengku Buwana VII menanggalkan tahta kerajaan untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Pemikiran tersebut menjadikan Hamengku Buwana VII sebagai raja yang tidak memikirkan dirinya sendiri, namun juga terhadap kekuasaannya sehingga dapat dikatakan sebagai pahlawan yang mengorbankan kepentingan pribadinya demi kemajuan dan kedamaian daerah kekuasaannya. Hamengku Buwana VII sebagai seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai seseorang yang sedang melakukan *jihad fi sabilillah*. Jihad tidak hanya dengan melakukan peperangan dengan senjata dan kontak fisik, namun dengan melakukan perlawanan terhadap kemiskinan, kebodohan. Sikap Hamengku Buwana VII inilah selalu diingat, bahkan di akhir kepemimpinannya banyak yang merasa kehilangan tokoh pemimpin seperti ini.

#### **E. SERAT SAPTASTHA DAN LEGITIMASI KEKUASAAN KASULTAN-AN ISLAM**

Haryanto (2005: 2) berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain sehingga orang lain mengikuti dan sesuai dengan perintah oleh orang yang memiliki kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dapat dikatakan sebagai pengakuan kekuasaan yang legal, pengakuan tersebut tidak hanya didapatkan oleh kelompoknya semata, namun diakui oleh berbagai kelompok mengenai kekuasaan yang dipimpinya. Pemimpin memerlukan legitimasi agar tidak menimbulkan keraguan terhadap rakyat yang diperintahnya. Seperti halnya kepemimpinan Hamengku Buwana VII yang mendapatkan legitimasi kekuasaan secara penuh.

Antlov (2001: xix-xxi) menerangkan bahwa bentuk-bentuk legitimasi bisa didapatkan melalui adanya mitos atau kegaiban dan legitimasi dengan pengumpulan pusaka. Melalui naskah *Serat Saptastha*, legitimasi kekuasaan Hamengku Buwana VII tergambar. *Serat Saptastha* berisi mengenai akhir kepemimpinan Hamengku Buwana VII. Keputusan Hamengku Buwana VII untuk meletakkan tahta raja dan memilih menjadi *pandhita* menciptakan

pengakuan dari berbagai pihak bahwa Hamengku Buwana VII merupakan raja yang tidak menggebu-gebu dengan keduniawian. Tanpa perlu menunjukkan pencapaian yang dilakukannya, Hamengku Buwana VII tetap mendapatkan pengakuan legitimasi kekuasaannya oleh para rakyat, pendukung maupun koleganya.

Cuplikan isi naskah *Serat Saptastha* pupuh mijil pada 27 dan 28, yakni:

(27) *Iya amung bakal mituruti/ karepé putrèng ngong/ linggar saka ing kadhaton kéné./ Dhawuh ingsun iya ing saiki/ kabèh gedhé cilik/ wadon ing kadhatun/*

(28) *ing kang ijeh tuhu sutresna sih/ terus lahir batos/ marang panjenengan ingsun. Kabèh/ iku pasthi kang ingsun lilani/ andhèrek tut wuri/ ing saparaningsun./* (Dirgantara, 2014: 66).

Terjemahan

(27) Saya hanya akan menuruti keinginan putraku untuk keluar dari kerajaan ini. Perintahku sekarang para putri baik besar ataupun kecil di kerajaan (28) yang masih setia terus lahir batin kepadaku, semua itu pasti yang saya perkenankan mengikuti kemanapun saya berada (Dirgantara, 2014: 76).

Pilihan Hamengku Buwana VII menghabiskan usia tuanya sebagai *pandhita* memberikan pengetahuan baru bahwa Hamengku Buwana VII lebih mendekati diri kepada Sang Pencipta. Harapannya mendekati diri tentu keinginan untuk menikmati hidup yang damai dan tentram, sebagai kasultanan Islam yang dilakukan oleh Hamengku Buwana VII seperti citra para pemimpin yang beragama Islam lebih memilih menghabiskan masa tua dengan mendekati kepada Tuhan. Sebagai umat muslim, Hamengku Buwana VII menunjukkan sikap bahwa ada kehidupan yang lebih kekal dari dunia, namun tanpa disadari pilihan Hamengku Buwana VII memilih lebih religius inilah menunjukkan legitimasinya sehingga rakyat mengakui kewibawaan Hamengku Buwana VII sebagai pribadi yang tanggung dan kharismatik.

Melalui peristiwa *lengser keprabon* yang dilakukan oleh Hamengku Buwana VII memberikan kedamaian di Kasultanan Yogyakarta. Kedamaian tersebut bertujuan agar tidak adanya pertikaian akibat ada dua raja di Kasultanan Yogyakarta jika Sri Sultan Hamengku Buwana VII tidak memilih untuk mengundurkan diri. *Lengser keprabon mandeg pandhita* merupakan konsep suksesi Jawa yang mengambil referensi dari cerita pewayangan (Purwadi, 2007: 474).

Dengan demikian, kawiryan Hamengkubuwana VII yan rela *lengser keprabon* adalah bentuk usaha untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak berguna akibat perebutan kekuasaan. Hal ini sesuai ajaran Islam bahwa darah sesama muslim adalah haram. Jangankan membunuhnya, mencela dan menghina saja sudah merupakan suatu hal yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, “Seorang muslim itu bersaudara terhadap muslim lainnya, ia tidak boleh menganiaya dan menghينanya. Seseorang cukup dianggap berlaku jahat karena ia menghina saudaranya sesama muslim.”(HR. Muslim).

## F. SIMPULAN

Naskah *Serat Saptastha* dapat dikatakan sebagai perwujudan penghormatan untuk menghargai jasa Hamengku Buwana VII selama memimpin sebagai raja. Banyak perubahan terjadi di masa kepemimpinannya, sikapnya dalam memimpin memberikan pengetahuan kepada khalayak luas mengenai pola kepemimpinan Hamengku Buwana VII. Kekuasaannya sebagai kasultanan Islam menambah daftar citra yang ditampilkannya, seperti pilihannya untuk memilih menjadi *pandhita* pasca lengsernya sebagai raja. Pilihan hidupnya ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta memberikan pengaruh kepada rakyat mengenai Hamengku Buwana VII. Pengaruh tersebut berupa pengetahuan mengenai Hamengku Buwana VII sebagai sultan yang religius, padahal Hamengku Buwana VII hidup bergelimang harta terbukti dengan adanya sebutan sebagai *Sinuwun Sugih*, sebutan tersebut tidak membuatnya untuk memikirkan keduniawian semata. Peristiwa *lengser keprabon* yang dialaminya mengisyaratkan bahwa Hamengku Buwana VII merupakan raja yang tidak mementingkan dirinya semata, sikapnya yang lapang dada dan menerima ketentuannya inilah semakin dicintai oleh rakyatnya dan dikenang sepanjang masa. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk pengamalan ajaran Islam dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk menghindari pertumpahan darah sesama muslim akibat perebutan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2014. *Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

- Dirgantara, Asep Berlian. 2014. *Serat Saptastha dalam Kajian Filologi*. Program Studi Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang: Skripsi.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Fajrul, Anang. 2016. *Konsep Kekuasaan Jawa dan Penerapannya Oleh Raja-raja Mataram*. Diposting pada tgl 1 maret 2016 [http://anang-fajrul-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-153697-Anang Fajrul Ukhwaludin-Konsep Kekuasaan Jawa dan Penerapannya Oleh Raja-raja Mataram .html](http://anang-fajrul-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-153697-Anang_Fajrul_Ukhwaludin-Konsep_Kekuasaan_Jawa_dan_Penerapannya_Oleh_Raja-raja_Mataram.html) (diakses pada tanggal 2 September 2017 20:15)
- Foucault, Michel. 1982. "The Subject and Power". *Critical Inquiry*, Vol. 8, No. 4. (Summer, 1982), pp. 777-795. The University of Chicago Press.
- Graham, Linda J. 2005. *Discourse Analysis And The Critical Use of Foucault*. Paper presented at Australian Association for Research in Education 2005 Annual Conference, Sydney. 27th November – 1st December, Queensland University of Technology.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2013. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hans Antlov, Sven Cederroth. 2001. *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Diterjemahkan oleh P. Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: FISIP Universitas Gadjah Mada.
- Hook, Derek. 2001. *Discourse, Knowledge, Materiality, History: Foucault and Discourse Analysis*. London: LSE Research Online.
- Lubis, Yusuf Akhyar. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moedjanto, G. 1994. *Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau*. Yayasan Obor Indonesia.
- Purwadi. 2007. *Sejarah Raja-raja Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Soeratman, Darsiti. 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Susetya, Wawan. 2007. *Kepemimpinan Jawa*. Yogyakarta: Narasi.

- Sulistiyono. 2013. *Karakter Kepemimpinan Jawa (Studi Pemikiran Paku Buwana IX dalam Serat Wulang Raja Putra)*. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi.
- Yuniyanto, Tri. 2010. *Daulat Raja Menuju Daulat Rakyat Demokratisasi Pemerintahan di Yogyakarta*. Solo: Cakrabooks.
- Zuhriyah, Lailatuzz. 2013. "Kosmologi Islam Kasultanan Yogyakarta Hadi-ningrat". Dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Edisi 3 Nomor 1 Juni 2013.